

Analisis Mimesis dan *Framing* terhadap Prasasti Raja Bali Kuno [Studi Kasus Kebahasaan dalam Prasasti Raja Guṇapriya dan Dharmmodāyana]

W.A. Sindhu Gitananda
Universitas Hindu Indonesia
sindhugitananda@unhi.ac.id

I Gde Agus Darma Putra
Universitas Hindu Indonesia
dharmaputra432@gmail.com

Abstrak

Kemapanan bahasa Bali Kuno sejak 804 Śaka dapat dilihat dari seni arca, bahasa, birokrasi maupun pola hidup masyarakat yang telah mandiri meski tanpa campur tangan orang luar pemerintahan. Menariknya, penggunaannya berubah pada masa pemerintahan Guṇapriya dan Dharmmodāyana. Penelitian dilaksanakan melalui studi teks dengan metode bandingan untuk melihat pola mimesis dan *framing* prasasti-prasasti yang dikeluarkan raja Guṇapriya dan Dharmmodāyana. Persoalan yang mengemuka adalah terutama tentang informasi pada prasasti Bali Kuno disajikan oleh pemerintahan. Fenomena tersebut sangat menarik terutama jika dikomparasikan satu sama lain dan dengan data-data lain, seperti prasasti-prasasti yang dikeluarkan semasa pemerintahan Ugrasena untuk melihat perbedaan polanya. Selain itu, perbandingan juga dilakukan prasasti Sukabumi yang menandakan peralihan penggunaan bahasa Sanskrta menjadi Jawa Kuno pada abad ke-9. Pola yang sama tampaknya ditiru – memperlihatkan ciri-ciri mimesis akibat tren kebahasaan – untuk menegaskan ‘kekuasaan’ Jawa atas produk-produk kebudayaannya di masa Bali Kuno. Selanjutnya, prasasti-prasasti tersebut memperlihatkan hubungan intratekstual, ekstratekstual, intertekstual dan circumtekstual sangat erat dengan kedudukan bahasa Jawa Kuno.

Kata Kunci: *Mimesis, Framing, Prasasti, Bali Kuno, Jawa Kuno*

1. Pendahuluan

Prasasti Bali Kuno yang dicatat oleh Goris pada tahun 1954, kemudian difoto, dan arsipnya kini disimpan di Universiteit Leiden adalah sebanyak 174 prasasti. Goris dengan tegas menyebut, *wij beschikken thans in total over 174 inscripties* (Kami kini memiliki 174 prasasti). ‘Kami’ yang dimaksud oleh Goris adalah dirinya sendiri, dan mungkin saja sebuah Tim yang dia terjunkan untuk mengobservasi serta mendigitalisasi prasasti-prasasti tersebut. Dari 174 prasasti tersebut, setidaknya ada lima buah kelompok prasasti yang dikeluarkan oleh raja istri-suami¹ Guṇapriyadharmapatni dan Dharmmodāyana pada kisaran tahun 911-933

¹ Istilah ini pertama kali digunakan oleh Semadi Astra pada tahun 2002. Lih. Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat Pada Masa Gunapriyadharmapatni-Dharmodayana Warmadewa. Dalam jurnal *Humaniora* Volume XIV. No. 2/2002.

Śaka (989-1011 Masehi). Prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh kedua pasangan ini memberikan satu petunjuk penting tentang penggunaan bahasa di dalam prasasti-prasasti Bali. Terutama adalah prasasti Buwahan A, yang diterbitkan tahun 916 Śaka (994 Masehi) menjadi tonggak penting dalam petunjuk yang dimaksud. Di tengah arus Bahasa Bali Kuno yang telah tercatat digunakan dalam dekrit-dekrit yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya, secara mengejutkan kedua pasangan ini mengeluarkan prasasti dengan bahasa yang berbeda dari kelaziman pada masa itu. Bahasa Jawa Kuno yang jauh dari asalnya, seolah-olah tiba-tiba saja merenggut kedudukan bahasa Bali Kuno yang telah ajeg selama 112 tahun. Bukti yang tidak dapat dinafikan ini merupakan satu penanda penting dalam melihat posisi bahasa dalam pemerintahan Bali Kuno.

Proses pergantian bahasa dari bahasa Bali Kuno ke bahasa Jawa Kuno nampaknya tidak dilakukan tanpa alasan yang kuat. Pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan ini, dianggap sebagai latar belakang pergantian itu. Terutama disebabkan oleh keberadaan Guṇapriyadharmmapatni sebagai perempuan keturunan Jawa yang menikah dengan Dharmodāyana yang keturunan Bali. Hasil pernikahan ini pula yang nantinya melahirkan Airlāṅga, seorang keturunan Bali yang nanti berkuasa di Jawa. Begitu pula Anak Wuṅśu yang namanya disebut-sebut dalam prasasti berikutnya, dan diduga adalah anak paling bungsu dari pasangan ini. Juga melahirkan Marakata, raja Bali yang meneruskan pemakaian bahasa Jawa Kuno dalam prasasti-prasasti Bali, kakak dari Anak Wungsu dan adik Airlangga.

Karena terkesan kuatnya pengaruh Jawa pada 911-933 Śaka, diduga ada hubungan langsung dengan keberadaan Guṇapriyadharmmapatni yang merupakan keturunan Pu Siṅdok. Pu Siṅdok memiliki seorang putri bernama Śrī Isānatuṅgawijaya, yang menikah dengan Śrī Lokapāla. Mereka mempunyai anak, bernama Śrī Makutawaṅśawarddhana. Śrī Makutawaṅśawarddha mempunyai anak bernama Guṇapriyadharmmapatnī (Mahendradattā) yang menikah dengan Udāyana, seorang pangeran dari Bali². Mereka mempunyai tiga orang anak: Airlāṅga, Marakata Paṅkaja Warmadewa dan Anak Wuṅśu. Airlāṅga menjadi pewaris tahta di Jawa. Marakata dan Anak Wuṅśu di Bali (Casparis, 1958: 11; Tedjowasojo, 2003: 323).

² Casparis memberikan elaborasi yang menarik mengenai suatu informasi dan hipotesa yang ia dapat, bahwa Udāyana sempat disamakan dengan seorang raja Kamboja yakni Udayādityawarman yang diusir dari Kamboja kira-kira tahun 1000 oleh Suryawarman. Menurut Casparis, hipotesa itu berdasarkan pada gambar-gambar timbul, angka tahun 977 dan nama Udāyana yang tertulis di Jalatunda. Namun pada kesempatan yang sama, Casparis masih meragukan hipotesa ini karena menurutnya ada beberapa kesukaran kronologis.

Berkenaan dengan silsilah itu, prasasti Air Tabar B yang diterbitkan pada tahun 983 Masehi, Menyebut nama raja yakni Śrī Mahārāja Śrī Wijaya Mahādewi yang diduga sebagai putri kerajaan Sriwijaya oleh Callenfels. Asumsi ini hadir karena nama pejabat yang serupa dengan prasasti Jawa yakni *makudur*, *wadihati*, dan *pangkaja*. Moens menduga bahwa ia adalah putri dari Mpu Sindok, yakni Sri Isanatunggawijaya. Menariknya prasasti ini menggunakan bahasa Bali Kuno.

Oleh karena keberadaan bahasa Bali Kuno yang ajeg pada masa sebelumnya, dan dengan dugaan bahwa masyarakat Bali ketika itu juga menggunakan bahasa Bali Kuno sebagai bahasa komunikasi, pergantian yang dilakukan oleh raja Gunapriyadharmmapatni dan Dharmodāyana sangat menarik. Bila asumsi bahwa masyarakat saat itu memang menggunakan bahasa Bali Kuno dan mengerti, bahkan paham, jadi untuk apa bahasa yang sudah *established* ini diganti? Bukankah dengan begitu bahasa sebagai alat komunikasi kehilangan marwahnya? Persoalan ini dapat ditarik dalam satu analisis, terutama tentang bagaimana informasi pada prasasti Bali Kuno disajikan oleh pemerintahan, yang tentu saja memiliki kaitan dengan segala pembingkai (*framing*) yang menggejala sebelum dan semasa kekuasaan sedang berlangsung.

2. Metode

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang difokuskan mengkaji teks yang tertulis dalam prasasti Bebetin AII (911 Śaka; 989 M), Serai AII (915 Śaka; 993 M), Buwahan A (916 Śaka; 994 M), Sading A (923 Śaka; 1001 M), dan Batur, Pura Abang A (933 Śaka; 1011 M) yang dikumpulkan dan diklasifikasi oleh Goris. Kelima prasasti dipilih sebagai sumber data primer karena menunjukkan perubahan pilihan bahasa antara penggunaan bahasa Bali Kuno dan Jawa Kuno dalam kronologi yang relatif berdekatan. Selain itu, kelima prasasti tersebut juga dikeluarkan pada masa pemerintahan Dharmmodāyana di Bali yang menunjukkan pergantian bahasa yang dinamis. Data dikumpulkan dengan meninjau kembali prasasti-prasasti tersebut untuk melihat dinamika kebahasaannya yang tentu sangat erat kaitannya dengan dinamika politik (kekuasaan), sosial dan pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Studi teks dengan metode bandingan diterapkan untuk melihat lebih dalam fenomena-fenomena tekstual yang memungkinkan hadirnya interpretasi baru.

Untuk memahami secara lebih mendalam dinamika penggunaan bahasa tersebut digunakan dua teori secara eklektik, yaitu teori mimesis dan *framing*.

Berdasarkan Rene Girard, teori Mimesis beroperasi untuk melihat peniruan-peniruan (cara) yang terjadi dalam lingkup karya sastra, terutama untuk memahami tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu kisah (Lih. Sindhunata, 2007). Teori ini juga disebut teori hasrat segitiga, yaitu hubungan Subjek-mediator-objek. Terdapat mediator internal dan eksternal yang relevan untuk melihat hubungan raja-raja dan hubungannya dengan kemunculan suatu prasasti. Dalam kaitannya dengan prasasti, berdasarkan teori ini terjadi peniruan subjek terhadap pola-pola kebahasaan yang digunakan oleh mediator-mediator, baik internal (raja dan ratu, raja dan raja) maupun eksternal (tokoh idola, dewa junjungan berdasarkan paham keagamaan yang dianut, dan sebagainya).

Pemetaan mediator-mediator itu dilakukan dengan teori *framing* (lih. MacLachlan dan Reid, 1994) yang terdiri dari empat hal yakni intratekstual, ekstratekstual, intertekstual dan circumtekstual. Intratekstual berfokus pada hal-hal yang sifatnya intra di dalam teks, kebahasaan, tokoh-tokoh yang muncul dalam teks, hubungan antara kata, kalimat, serta urutannya. Ekstratekstual mencakup hal-hal yang sifatnya di luar teks, seperti pengetahuan dan pandangan dunia penulis. Intertekstual berkaitan dengan kebahasaan dan teks yang mempengaruhi bentuk dan fenomena kemunculan suatu teks, sebagai pengulangan atau bahkan teks baru sebagai hasil perkembangan teks-teks sebelumnya. Sementara Circumtekstual adalah keadaan atau lingkungan sekitar yang memungkinkan munculnya suatu teks.

3. Hasil dan Pembahasan

Tahun 916 Śaka (994 M) pemerintahan Śri Guṇapriyadharmmapatni dan Śrī Dharmodāyana Warmadewa, mengeluarkan prasasti Buwahan A yang menggunakan bahasa Jawa Kuno. Tetapi selain satu kelompok prasasti tersebut, pasangan ini sebelumnya telah menerbitkan dua prasasti lainnya. Menariknya, kedua prasasti pendahulu itu menggunakan bahasa Bali Kuno. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Bentuk Prasasti-prasasti Raja Guṇapriya dan Dharmodāyana

No.	Nama (Gor.)	Gor. ³	Isi Prasasti	Terjemahan (b. Indonesia)	Bahasa	Raja	Tahun (Śaka)	Tahun (Masehi)
-----	-------------	-------------------	--------------	---------------------------	--------	------	--------------	----------------

³ Singkatan ini merujuk pada penomoran yang diberikan oleh Goris. Penomoran ini digunakan karena seluruh data-data prasasti yang disajikan dalam tulisan ini berasal dari karya Goris tersebut.

1	Bebetin AII.	301	punaḥ di śaka 911 wulan posa kṛṣṇa trayodaśi, rggas pasargelap hari ketigabelas, bwijayakrānta, tatkālan sañ ratu luhur śri gunapriyadharmmapat ni, sañ ratu maruhani śri Dharmmodāyanani, (dan) raja laki-laki warmmadewa, umanugrahēn tu anak banua di banwa bharu [...]	Lagi pada 911 Śaka bulan keenam paroh gelap hari ketigabelas, saat hari pasaran <i>wijayakrānta</i> , ketika raja perempuan Śri Gunapriyadharmmapat ni, (dan) raja laki-laki Śri Dharmmodāyanani, Warmmadewa, menganugerahkan kepada masyarakat di wilayah Bharu [...]	Bali Kuno	Guṇapriya dharmmapatni & Dharmmodāyana	911	989
2	Serai AII.	302	śaka 915 bulan margasira śuklaparoh terang hari ke daśami, rggas pasarsepuluh, hari pasaran bijayakrānta, tatkālan anak mabwatthaji di buru karaksayañña suñsañ, rñgan praktikāya tihuñ [...]	915 Śaka bulan kelima paroh terang hari kesepuluh, hari pasaran <i>wijayakrānta</i> , ketika dimasyarakat melaksanakan perintah raja di Buru untuk melindunginya yang turun, pejabat Pratikāya yang bernama Tihuñ [...]	Bali Kuno	Guṇapriya dharmmapatni & Dharmmodāyana	915	993
3	Buwahan A.	303	ing śaka 916 phalguṇa māsa, tithi pañcami, śuklapakṣa, pa, ka, wra, marakiḥ wāra, irikā diwaśa nikañ karāmān i wiñkañ ranu bwahan sahlukayu [...]	Pada 916 Śaka bulan kedelapan, hari kelima, paroh terang, <i>paniron, kaliwon, wraspati</i> , hari <i>marakih</i> , saat itu hari baik masyarakat di Wiñkañ Raṇu Bwahan semua pejabat Hulu Kayu [...]	Jawa Kuno	Guṇapriya dharmmapatni & Dharmmodāyana	916	994
4	Sading A.	304	śaka 923 wulan jyeṣṭha kṛṣṇa daśami, rggas pasar bwijayapura, tatkālan sañ ratu śri giṇagriyadharmmapatni, ida maruhani śri Dharmmodāyanani, warmmadewa, [...]	923 Śaka bulan kesebelas, paroh gelap hari kesepuluh, hari pasaran <i>wijayapura</i> , ketika raja Śri Giṇagriyadharmmapatni, beliau (raja) laki-laki Śri Dharmmodāyanani, Warmmadewa, [...]	Bali Kuno	Guṇapriya dharmmapatni & Dharmmodāyana	923	1001
5	Batur, Pura Abang A	305	ing śaka 933 cetra māsa, tithi pratipāda, śuklapakṣa, ha, pa, śu, wāra mahatal, irika, diwaśa nikañ karāmān i wiñkañ ranu air hawañ, sapanāmbahan [...]	Pada 933 Śaka bulan kesembilan, hari pertama, paroh terang, <i>haryang, paing, śukra</i> , hari <i>mahatal</i> , saat itu hari baik masyarakat di Wiñkañ Raṇu Air Hawañ, sepenyembahan [...]	Jawa Kuno	Dharmmodāyana	933	1011

Tabel data di atas menunjukkan aliran perubahan yang dilakukan oleh Guṇapriyadharmmapatni dan Dharmmodāyana dalam kurun waktu sekitar 22 tahun. Dari 5 kelompok prasasti yang diterbitkan, ternyata ada 3 kelompok yang menggunakan bahasa Bali Kuno. Sedangkan hanya 2 kelompok yang menggunakan

bahasa Jawa Kuno. Menariknya lagi, setelah melakukan perubahan bahasa sebagaimana terlihat di dalam prasasti Buwahan A (916 Śaka), bahasa tersebut dialihkan lagi ke bahasa Bali Kuno pada tahun 923 Śaka sebagaimana terlihat pada prasasti Sading A. Dalam kurun waktu itu, bahasa Bali Kuno hanya bertahan selama tujuh tahun. Namun, sepuluh tahun setelah bahasa Bali Kuno dikembalikan ke posisinya yang bermartabat, bahasa ini kembali diganti menjadi Jawa Kuno. Kali ini bahkan dilakukan sendirian oleh Dharmmodāyana, pangeran yang dianggap asli Bali.

Perubahan ini perlu dipandang sebagai usaha pen-Jawa-an bagi Bali yang secara historis telah mapan dengan peradaban Bali Kuno dan Sanskrta-nya. Kemapanan itu dapat dilihat dari data-data prasasti yang ada, seni arca, bahasa, birokrasi maupun pola hidup masyarakat yang telah mandiri meski tanpa campur tangan orang luar dalam pemerintahan. Meskipun sangat minim, nyatanya perubahan tersebut berdampak panjang dalam penulisan prasasti-prasasti selanjutnya. Keputusan yang diambil oleh Dharmmodāyana barangkali tidak dapat dianggap sebagai pengkhianatan kepada bahasa ibunya sendiri. Tetapi spekulasi oleh para ahli yang menyatakan bahwa hal itu dilakukan oleh Dharmmodāyana semata-mata karena ia merasa tertekan, akibat dari kerajaannya yang dinyatakan sebagai kerajaan yang telah ditaklukkan⁴, tidak dapat dibuktikan dengan sangat pasti.

Walaupun demikian, penggunaan nama Guṇapriyadharmmapatni yang diletakkan sebelum nama Dharmmodāyana dapat menjadi penanda ke arah tersebut. Dengan kata lain, Dharmmodāyana menunjukkan memperlakukan permaisurinya sebagai mediator internal dalam kerajaannya, yang tentu saja ditunjukkan dengan penggunaan bahasanya. Sesuai pandangan teori mimesis, mediator selalu memiliki kedudukan lebih tinggi dari subjek sehingga memungkinkan terjadinya peniruan-peniruan, halnya penggunaan bahasa Jawa Kuno. Selain itu, pada prasasti Bebetin AII dan Sading A yang sama-sama menggunakan bahasa Bali Kuno, misalnya, memperlihatkan semacam kerancuan jika menyoal cara penyebutan keduanya yang sama-sama menggunakan istilah *ratu* (‘raja’; ‘yang ditinggikan’) yang mempertegas kedudukan Guṇapriyadharmmapatni.

Walaupun kenyataannya bahwa bahasa Jawa Kuno pernah diubah kembali ke bahasa Bali Kuno seperti yang dapat dilihat pada prasasti Sading A (923 Śaka) yang

⁴ Lih. Prasasti Pucangan Sanskrta (958 Śaka) baris no. 10 yang menyebutkan *yavarājalakṣmiḥ dvīpantare* (kemenangan raja Jawa di luar pulau). Keterangan *dvīpantare* (di luar pulau) itulah yang diterjemahkan sebagai Bali. Dengan kata lain, Guṇapriya adalah tanda kemenangan bagi raja Jawa di Bali.

merupakan suatu penanda bahwa Dharmmodāyana pada level tertentu masih mempertimbangkan pemakaiannya. Akan tetapi, fenomena ini perlu ditelusuri ulang apakah terdapat indikasi bahwa preferensi kebahasaan tersebut memiliki kriteria khusus berkaitan dengan pembaca yang dituju. Terlebih lagi, apa yang ia lakukan pada tahun 933 Śaka, sungguh sangat di luar dugaan. Alih-alih kembali ke bahasa ibunya sendiri, seorang pangeran yang membanggakan itu justru memilih bahasa yang diperkenalkan oleh istrinya. Akan tetapi, penjelasan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut dengan mempertimbangkan segala kemungkinan, dalam hal ini berdasarkan argumentasi *framing* secara circumtekstual. Dengan begitu, kenyataan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk berspekulasi bahwa ada suatu faktor lain yang tampaknya lebih masuk akal dalam keputusan yang diambilnya itu.

Pertama-tama, penting kiranya meninjau kembali dasar hipotesis yang menyatakan bahwa Udāyana berasal dari Bali mesti kita pertimbangkan lagi. Tedjowasono (2003: 163) bahkan menyebutkan bahwa Udāyana lahir di Bali. Berdasarkan data-data prasasti yang ada, tidak ada satu pun bukti kuat yang menyatakan bahwa Udāyana berasal dari Bali, atau bahkan terlahir di Bali. Asumsi bahwa Udāyana berasal dari Bali, adalah kesinambungan informasi yang didapat dari prasasti Bali Kuno dan prasasti Pucangan Sanskrta⁵ yang menyatakan bahwa Guṇapriyadharmmapatni *upayacchate* (lihat baris 11), yang berarti ‘dia pergi menuju.’ Maksudnya adalah Guṇapriyadharmmapatni menuju Udāyana, dengan kata lain menikah dengannya.

Kesinambungan informasi lainnya adalah bahwa Udāyana berada di luar pulau (dvīpantare). Namun informasi terakhir ini tidak menyatakan apa-apa mengenai asal muasal Udāyana. Itu artinya, pandangan bahwa Udāyana berasal dari Bali merupakan tafsir yang dikonstruksi oleh peneliti-peneliti. Peneliti-peneliti yang dimaksud misalkan: Casparis (1958), Goris (1965), Soemadio (1984), Tedjowasono (2003), Witasari (2009) dan lain sebagainya. Mudah-mudahan, berdasarkan data enskripsi yang ada, memang secara circumtekstual, secara politik Bali memiliki kedudukan di bawah penaklukan Jawa pada abad X. Artinya, lingkungan kebahasaan prasasti pada masa itu menghendaki – masih memungkinkan – penggunaan baik bahasa Jawa Kuno maupun Bali Kuno sebagai bahasa resmi pemerintahan. Dengan demikian, dugaan bahwa Bali

⁵ Prasasti tertua yang menyebut Udāyana adalah Bebetin AII (911 Śaka). Sedangkan Pucangan baru terbit pada tahun 958 Śaka.

telah ditaklukkan oleh Jawa pada masa itu, barangkali benar adanya. Namun bukan berarti yang dikalahkan waktu itu adalah Udāyana sendiri. Lebih-lebih anggapan bahwa Udāyana berasal dari silsilah dinasti Warmadewa patut dikaji lagi, berhubung sebuah pembacaan terkini mengenai beberapa prasasti semisal prasasti Blanjong tidak menyebutkan kata Dewa di belakang kata Warma⁶. Sehingga perlu dilakukan pembacaan lagi pada prasasti-prasasti Bali Kuno yang telah dibaca oleh ahli-ahli pendahulu.

Di dalam Prasasti Pucangan Sanskrta sendiri, Udāyana dinyatakan sebagai keturunan dari seorang yang *viśiṣṭa* (diunggulkan) dan *viśuddha* (disucikan). Cara pandang yang seolah-olah memuji leluhur Udāyana ini tidak masuk akal, bila kita mengikuti pandangan bahwa mula-mula leluhur Udāyana adalah musuh yang ditaklukkan oleh kerajaan Jawa. Pola yang jauh berbeda ditunjukkan dalam prasasti yang sama, ketika menuturkan perihal raja Wēñkēr yang dianalogikan seperti Rahwana yang *adhamah* (buruk sifatnya, hina) (Witasari, 2009: 132). Raja Wēñkēr ditaklukkan oleh Airlaṅga pada tahun 959 Śaka. Perbedaan itu terlalu signifikan bila hanya dipandang sebagai sebuah kebetulan semata.

Udāyana sendiri disebutkan namanya pertama kali dalam prasasti Bebetin AII (911 Śaka) dan tidak sendirian. Ia disebutkan bersama dengan istrinya, dan disebutkan belakangan. Karena disebutkan belakangan, hal ini dianggap aneh, terutama oleh para ahli yang berpandangan bahwa Bali menganut mahzab patrilineal. Tafsir ini dapat dibandingkan dengan prasasti Kēhēn C (1206 Śaka) yang menyebutkan kata Bhaṭāra, padahal yang dimaksud adalah Guru Śrī Adikunti Ketana yang jelas-jelas seorang perempuan. Informasi tersebut perlu dijadikan pembanding untuk melihat apakah Bali di masa-masa kuno memang menganut mahzab patrilineal, atau malah sebaliknya, Bali lebih bersifat matrilineal sebagaimana kebanyakan kebudayaan yang berkembang di daerah Austronesia. Indikasi mengarah kepada sistem budaya yang dianut masyarakat Bali Kuno tersebut memang perlu pendalaman lebih menyeluruh.

Selain berdasarkan perbandingan bahasa yang digunakan di dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Guṇapriya dan Dharmmodāyana, di dalam prasasti juga terdapat satu hal lain yang sangat menarik bila diperbandingkan. Tentu yang

⁶ Prihatmoko dalam satu diskusi pada tanggal 8 Oktober 2023 menyampaikan secara lisan hasil bacaannya terhadap prasasti Blanjong bahwa di belakang kata Warma tidak menyebut kata Dewa. Ia menduga bahwa bacaan di belakang kata Warma adalah kata nāma dalam bahasa Sanskrta yang berarti nama sebagaimana dalam bahasa Indonesia.

dimaksud adalah bagian *sapatha* yang biasanya dimuat pada akhir prasasti. Berikut ini adalah isi prasasti yang dimuat dalam prasasti Guṇapriya dan Dharmmodāyana.

Tabel 2. *Sapatha* Prasasti Raja Guṇapriya dan Dharmmodāyana

No	Gor.	Nama	Bahasa	<i>Sapatha</i>
1	301	Bebetin AII.	Bali Kuno	-
2	302	Serai AII.	Bali Kuno	-
3	303	Bwahan A	Jawa Kuno	-
4	304	Sading A	Bali Kuno	-
5	305	Batur Pura Abang A	Jawa Kuno	Kunañ asiñ mukil mukil ya, tan tmwañ sarbwa upayanya, mwañ phalaninyanya, tke putunya, tke buyutbuyut ya kawuri, kunañ asiñ umambah ambañ ya, atmahana taktak, wdit, lintah, sal(w)ir niñ sabwa papa, mahāpātaka tmunya,

Sapatha yang disebutkan di atas, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut.

[...] Karenanya siapa pun yang mengubah-ubahnya, segala usahanya tidak tercapai, dan akibatnya (diterima), sampai cucunya, cicit-cicit selanjutnya, dan siapapun yang menginjak-injaknya, akan menjadi taktak, ular kecil, lintah, segala macam kekotoran, dosa besar yang didapatnya [...]

Dapat dikatakan kemudian bahwa kemunculan prasasti-prasasti berbahasa Jawa Kuno berkaitan dengan pengaruh Guṇapriya secara internal. Dengan kata lain, pada zaman itu, pengaruh Jawa mulai sangat kental di Bali. Munculnya *Sapatha* pada masa pemerintahan Udāyana merupakan fenomena menarik, yang menegaskan pengaruh Jawa Kuno pada abad X di Bali, yang justru muncul pada Prasasti Pura Batur Abang A dan tanpa nama Guṇapriya. *Sapatha* secara mimesis juga dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan atau kriteria yang memungkinkan raja untuk mengajegkan kekuasaannya. Tetapi sebelumnya, terjadi semacam upaya pengembalian ke Bali Kuno. Dalam hal ini, dapat dicurigai terdapat pula mediator eksternal yang berperan, baik dalam lingkup kekuasaan yang lebih tinggi di Jawa atau

pilihan kepercayaan yang dianut pemerintahan Guṇapriya dan Dharmmodāyana. Dapat dikatakan kemudian, secara intertekstual memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa Jawa Kuno sebagai bahasa resmi merujuk kepada penggunaannya di Jawa di masa itu. Selain itu, secara ekstratekstual dan intratekstual memperlihatkan bahwa pengetahuan dan pola Jawa Kuno semakin menguat dengan ditambahkannya *Sapatha* pada prasasti terakhir, Batur Pura Abang A. Hal ini juga berimplikasi bahwa secara sosial-politik, berdasarkan pilihan penggunaan bahasanya, kedudukan (kekuasaan) Jawa semakin menguat di Bali.

Dari informasi-informasi itulah dapat diberikan label terhadap peristiwa-peristiwa yang menggejala pada masa informasi itu disebarkan. Terutama bila dikomparasikan dengan prasasti Sukabumi yang menandakan peralihan penggunaan bahasa Sanskrta menjadi Jawa Kuno pada abad ke-9⁷. Pola yang sama tampaknya ditiru, misalnya penggunaan angka tahun yang muncul di awal prasasti⁸ – memperlihatkan ciri-ciri mimesis akibat tren kebahasaan – untuk menegaskan ‘kekuasaan’ Jawa atas produk-produk kebudayaannya pada masa Bali Kuno, khususnya pada masa pemerintahan Dharmmodāyana yang berimplikasi hingga pemerintahan setelahnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan: Bahasa merupakan identitas sosial-politik yang paling mudah diidentifikasi. Pengubahan bahasa di dalam prasasti merupakan usaha untuk mengubah identitas sosial sehingga Bali kehilangan identitas ke-Bali Kuno-annya secara perlahan, terutama bahasa dalam ragam resmi.

Secara mimesis, di satu sisi terjadi peniruan yang dilakukan terhadap prasasti-prasasti sejaman yang muncul di Jawa abad X yang dikeluarkan atas nama Guṇapriyadharmapatni dan Dharmmodāyana, yang semakin menguat setelah diadopsinya pola dan Bahasa Jawa Kuno. Hal ini mengindikasikan bahwa peran mediator internal, yaitu Guṇapriyadharmapatni sangat signifikan dalam mengubah preferensi penggunaan bahasa Jawa Kuno ketimbang Bali Kuno. Di sisi lain, hal ini

⁷ Prasasti Sukabumi:

Swasti śakawarṣātīta 709 (?706) caitra māsa tithi ekādaśī śuklapakṣa wāra ha.wa.ca. tatkāla bhagawanta bāri i wulaṅgi sumakṣyakan simaniran mula ḍawuhan gawainira kali i hariṅjin hana ta lmaḥ [...]

[Selamat tahun Śaka 709 (?706) yang telah lalu pada bulan caitra hari kesebelas paroh terang hari haryang wage candra ketika penasihat Bāri di Wulanggi menyaksikan batas wilayahnya di sebelah barat dibuatnya (sebuah) sungai di Hariṅjin (memang) ada tanah [...]

⁸ Bandingkan dengan prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Ugrasena (915-942 M).

juga menunjukkan bahwa kekuasaan Jawa telah sedemikian kuat terhadap Bali pada masa itu. Secara framing, dapat dikatakan bahwa secara intratekstual pola kebahasaan prasasti telah berubah; ekstratekstual menunjukkan perkembangan pengetahuan dan pengaruh Jawa Kuno; intertekstualitasnya merujuk kepada prasasti-prasasti sebelumnya yang telah dikeluarkan di Jawa abad 9, terutama prasasti Sukabumi; circumtekstualitasnya menunjukkan pengaruh kuat lingkungan kebahasaan Jawa Kuno pada masa pemerintahan Guṇapriya dan Dharmmodāyana. Dengan kata lain, tren kebahasaan Jawa Kuno sangat kuat pada masa itu sehingga mengubah pilihan penggunaan bahasa dari Bali Kuno ke Jawa Kuno.

5. Daftar Pustaka

- Astra, S. (2002). Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat Pada Masa Gunapriyadharmapatni-Dharmodayana Warmadewa. Dalam Jurnal *Humaniora* Volume XIV. No. 2/2002.
- Casparis, J. G. de. (1958). *Airlangga*. Inagurasi Guru Besar dalam Sedjarah Indonesia Lama dan Bahasa Sanskerta pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Universitas Airlangga di Malang, pada tanggal 26 April 1958.
- Goris, R. (1954). *Prasasti Bali I dan II*. Bandung: Masa Baru.
- Goris, R. (1965). *Ancient History of Bali*. Faculty of Letter: Udayana University.
- MacLachlan, G. L., dan Reid, I. W. (1994). *Framing and Interpretation*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Sindhunata. (2007). *Kambing Hitam: Teori René Girard*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tejowasono, N. S. (2003). “Airlangga Raja Pembaharu di Jawa pada Abad Ke-11 Masehi”. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Witasari, V. H. (2009). “Prasasti Pucangan Sansekerta 959 Saka (suatu kajian ulang)”. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.